



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



RENCANA STRATEGIS

Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sulawesi Tengah

TAHUN 2025–2029



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 ini dapat terselesaikan.

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 Provinsi Sulawesi Tengah dapat disusun sebagai pedoman program dan kegiatan Pembangunan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan. Pembangunan adalah merupakan perubahan kearah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kecerdasan masyarakat dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan.

Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan merupakan uraian pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Gubernur terpilih periode 2025-2029 untuk urusan lingkungan hidup. Keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut secara langsung menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah yang diuraikan secara detil dalam strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi Sulawesi Tengah.

Rencana Strategis yang telah disusun ini tidak cukup berarti tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan. Komitmen dan motivasi yang tinggi sangat dibutuhkan untuk bisa melaksanakan rencana yang telah tersusun. Kiranya Renstra ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah dalam upaya mencapai sasaran-sasaran Dinas Lingkungan Hidup untuk

mendukung arah dan kebijakan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan Renstra DLH Provinsi Sulawesi Tengah ini, kami ucapkan terima kasih.

Palu, 2 November 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI TENGAH



DR. YOPIE M.I. PATIRO., SH., MH

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	i-1
DAFTAR ISI	i-3
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 I-1
1.1 Latar Belakang.....	I -1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan	I-10
1.4 Sistematika Penulisan	I-11
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	 II-1
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah --	II-1
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-15
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-23
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	II-26
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-27
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ---	II-31
2.2.2. Isu Strategis	II-33
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ----	 III-1
3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029.....	III-1
3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029	III-1

3.3.	Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 -----	III-3
3.4.	Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 -----	III-5
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN -----	IV-1
4.1.	Uraian Program -----	IV-1
4.2.	Uraian Kegiatan -----	IV-1
4.3.	Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif -----	IV-3
4.4.	Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah -----	IV-45
4.5.	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah -----	IV-56
4.6.	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) -----	IV-57
BAB V	PENUTUP -----	V-1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah (PD) khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Oleh karena itu, Renstra PD sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keterkaitan tersebut akan sangat ditentukan oleh hasil dari menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih, serta tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD kedalam Renstra PD sesuai tupoksi PD.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 sebagai sebuah Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025– 2029.

Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029.



Penyusunan perencanaan pembangunan bidang lingkungan hidup ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang berkonsekuensi pada pemberlakuan nomenklatur perangkat daerah baru yang menuntut setiap perangkat daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada RPJMD.

Kewajiban setiap perangkat daerah untuk menyusun Renstra tersebut juga diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang menetapkan ketentuan umum mengenai Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Selanjutnya dengan terbitnya Instruksi Menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2025 tentang tatacara penyusunan dokumen perencanaan baik RPJMD maupun RENSTRA OPD. RENSTRA OPD disusun paralel dengan penyusunan RPJMD.

Renstra perangkat daerah tersebut memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang membidangi urusan lingkungan hidup berkewajiban menyusun Renstra berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri



Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dimana keberadaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya dalam menjalankan rencana pembangunan bidang lingkungan hidup yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, serta dari keberadaannya untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun proses penyusunan Renstra dimulai dengan pengolahan data dan informasi terkait, dilanjutkan dengan analisis gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, review Renstra kementerian/lembaga dan Renstra OPD kabupaten/kota, penelaahan RTRW provinsi, analisis terhadap dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, perumusan isu-isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup, mempelajari surat edaran Gubernur perihal penyusunan rancangan Renstra OPD provinsi beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD provinsi, perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Provinsi yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama periode Renstra, termasuk lokasi kegiatan dan perumusan indikator kinerja OPD provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD provinsi.



Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah merupakan penjabaran yang bersifat lebih operasional dari RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah di lingkup OPD Dinas Lingkungan Hidup sekaligus menjadi langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Selanjutnya, diharapkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah dalam menjalankan fungsi lingkungan di Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan kewenangan yang diberikan secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor untuk mewujudkan visi Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Provinsi yang Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, antar sesama Manusia sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964



Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- 
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

- 
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagai diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6134);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 21. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam



Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);

23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Program Kampung Iklim;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- 
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
 30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup;
 31. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.651/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Bidang Kehutanan;
 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5899 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
 34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan;
 35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah;
 36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045;

- 
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029;
 38. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;
 39. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi;
 40. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah;
 41. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan Strategi Provinsi Dalam Pengelolaan Sampah;
 42. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 43. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
 44. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
 45. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor ... tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 disusun untuk mensinergikan dinamika dan aspirasi yang berkembang di masyarakat dengan Program Strategis Nasional



Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah, untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. Pedoman dan Landasan bagi seluruh aparat Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan masyarakat pada umumnya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
2. Membantu pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengarahkan kebijakan pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta perkembangan dinamika masyarakat dan kebutuhan pembangunan.
3. Mengembangkan sistem yang integratif, sistematis, koordinatif dan komprehensif dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat

- a. Latar Belakang;
- b. Dasar Hukum Penyusunan;



- c. Maksud dan Tujuan;
- d. Sistematika Penulisan.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 1. Sub bab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
 - a. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. Sumber Daya Perangkat Daerah;
 - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - d. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2. Sub bab Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
- 3. Sub bab Isu Strategis.

Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III paling sedikit memuat :

- 1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
- 2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
- 3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
- 4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat :

- 1. Uraian Program;
- 2. Uraian Kegiatan;
- 3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif;

- 
4. Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
 6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta memperhatikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74 / MenLHK/ Setjen/ Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan pasal 3, bahwa nomenklatur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di Provinsi adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi.

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 serta Pedoman Nomenklatur dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengubah Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menjadi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun 2022 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, ditetapkan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup yang kemudian pada tahun 2024 mengalami perubahan kembali dengan adanya Peraturan Gubernur



Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah adalah melaksanakan urusan pemerintahan provinsi di bidang lingkungan hidup, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas maka Kepala Dinas mempunyai fungsi dalam:

1. Perumusan kebijakan Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pencemaran serta Kerusakan Lingkungan Hidup;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur; dan
5. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup di bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.



Dalam melaksanakan Tugas, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah dibantu oleh 5 (lima) orang pejabat Administrator / Kepala Bidang / setara Bidang yaitu:

2.1.1.1 Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup.

Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas;
- g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan



Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan menyiapkan bahan penyusunan program, keuangan dan aset. Uraian tugas Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset meliputi:

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;
2. Melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundangundangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. Melaksanakan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit terkait;
4. Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan program, keuangan dan aset yang meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan, penyajian informasi, dan pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
5. Melaksanakan menyiapkan tugas teknis perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
6. Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
7. Melaksanakan menyiapkan laporan seluruh proses perencanaan program;

- 
8. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategi di lingkungan instansi terkait;
 9. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Dinas;
 10. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai dan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
 11. Melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan barang milik daerah;
 12. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
 13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 14. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset.

2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat. Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi:

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja sub bagian kepegawaian dan umum;

- 
2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan korpri;
 3. Melakukan koordinasi dan pembinaan urusan korpri di lingkungan dinas;
 4. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
 5. Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan kartu pegawai, kartu bpjs, taspen, kartu suami/isteri, skp, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
 6. Melaksanakan/mengelola angka kredit jabatan fungsional tertentu;
 7. Melaksanakan/menyusun penyusunan nominatif dan daftar urut kepangkatan serta mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian;
 8. Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan dinas;
 9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan sub bidang kepegawaian dan umum;
 10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan;
 11. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian.

2.1.1.2 Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan. Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas peyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring,



evaluasi, pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, dan pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Tata Lingkungan;
2. Menyusun penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
3. Melaksanakan pembinaan, penilaian, dan evaluasi terhadap D3TLH kabupaten/kota;
4. Mengendalikan pelaksanaan RPPLH Provinsi;
5. Menyusun dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH;
6. Menyusun, menetapkan dan meninjau kembali RPPLH Provinsi;
7. Membuat dan melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis RPJPD/RPJMD;
8. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLHS;
9. Menyelenggarakan KLHS Rencana Tata Ruang;
10. Menyelenggarakan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko Lingkungan Hidup;
11. Melaksanakan pembinaan, penilaian, evaluasi terhadap KLHS Kab/Kota;
12. Menyusun Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
13. Melaksanakan analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam;
14. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Pemerintah, Pernyataan Kesanggupan



Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan teknis dan Sertifikat Layak Operasi serta Kinerja Tim Uji Kelayakan Lingkungan;

15. Melaksanakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER);
16. Melaksanakan pembinaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER);
17. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (DIKPLHD);
18. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
19. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Tata Lingkungan.

2.1.1.3 Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup melaksanakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup;

- 
2. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Non B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup;
 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Non B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup;
 4. Pembinaan, pemantauan/pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan sampah, yang meliputi: koordinasi pengelolaan sampah dengan pihak dan unit terkait baik tingkat provinsi maupun kabupaten / kota, penetapan target pengurangan dan penanganan sampah serta penetapan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu, koordinasi pengelolaan sampah bila terjadi kondisi khusus (hari-hari besar, bencana alam/non alam dan perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/kota, koordinasi pengelolaan sampah di Bank Sampah, TPS3R, TPST, PDU, TPA dan atau TPA Regional, koordinasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah serta mengevaluasi kinerja pengelolaan sampah pemerintah kabupaten/kota melalui pembinaan dan pemantauan kota sehat/Adipura;
 5. Pembinaan, pemantauan/pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan Limbah B3 dan Non B3, meliputi: pelaksanaan pengelolaan Limbah, ketaatan pelaksanaan pengelolaan limbah, analisis neraca pengelolaan limbah serta memberikan pelayanan dan arahan terkait persetujuan teknis Pengelolaan limbah B3;
 6. Pembinaan, pemantauan/pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang Peningkatan Kapasitas dan Data



Lingkungan Hidup, meliputi: upaya penumbuhan kesadaran keluarga lestari, pendampingan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah (Adiwiyata), penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat (MHA), Pengembangan Diklat Teknis Lingkungan Hidup, penyuluhan dan kampanye terhadap kelompok/ lembaga penggiat lingkungan, penguatan kelembagaan pramuka peduli lingkungan (saka kalpataru), pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi (Kalpataru dan Nirwasitantra/Green leadership;

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
8. Penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup.

2.1.1.4 Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi meliputi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;

- 
2. Pengoordinasian dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan;
 3. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi, kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
 4. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 5. Pelaksanaan pengawasan ketaatan institusi dan non institusi terhadap pengendalian pencemaran air dan udara;
 6. Pelaksanaan pembinaan dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 7. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan;
 8. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 9. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian, serta penghentian) kerusakan lingkungan;
 10. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
 11. Pelaksanaan pembinaan dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi kerusakan lingkungan;
 12. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam;
 13. Pelaksanaan pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI) di luar kawasan hutan;
 14. Pelaksanaan penyusunan profil dan pengembangan keanekaragaman hayati;
 15. Pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;

- 
16. Pelaksanaan upaya mitigasi, adaptasi perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
 17. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi GRK;
 18. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup;
 19. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 20. Penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

2.1.1.5 Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis dengan tugas pokok melaksanakan tugas teknis penunjang bidang lingkungan hidup. Unit Pelaksanaan Teknis terdiri atas :

1. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup
2. Sub Bagian Tata Usaha

Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas di bidang laboratorium lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT Laboratorium Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

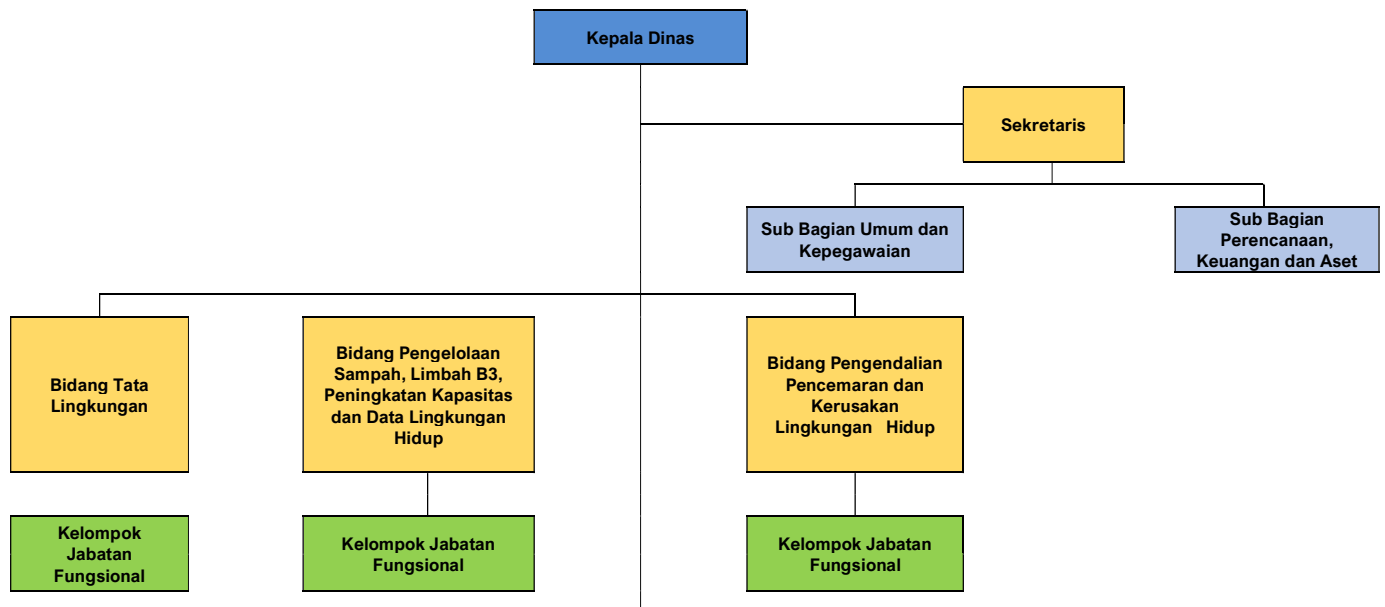
1. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang laboratorium lingkungan hidup;

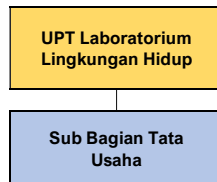
- 
2. Pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas sesuai dengan bidang laboratorium lingkungan hidup;
 3. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan kepada UPT.
 4. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Dalam pelaksanaan fungsi tersebut Kepala UPT dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha meliputi penyusunan program, kepegawaian dan umum, keuangan dan aset, perlengkapan serta pengelolaan naskah Dinas. Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
2. Menghimpun peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan;
3. Melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang ketatausahaan;
4. Melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan dengan instansi terkait;
5. Melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi pegawai, pembuatan Karpeg, Kartu BPJS, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, DIKLAT serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;

6. Melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan mengelola keuangan serta pembayaran gaji pegawai;
7. Melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusutan dan penghapusan perlengkapan kantor;
8. Melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup;
9. Melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
11. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup.



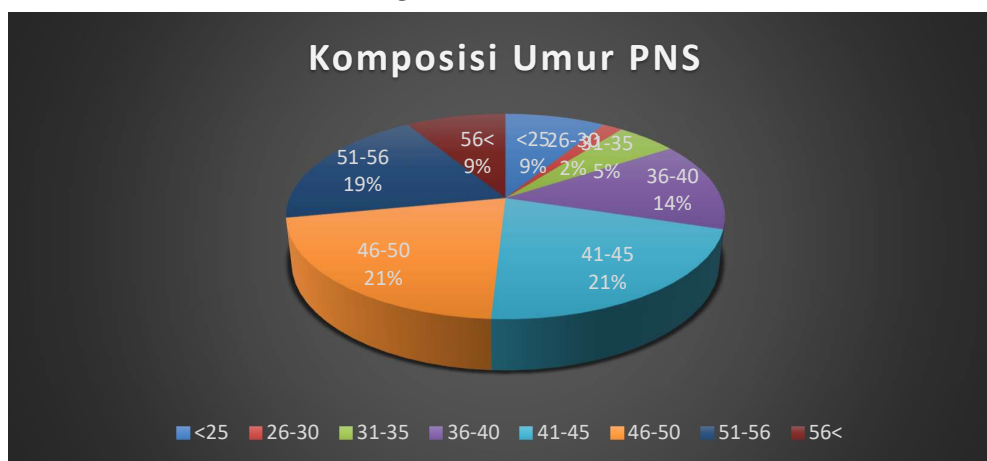


Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, adalah sumber daya manusia dan sumber daya aset/modal. Sumber daya manusia yang berstatus PNS di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah hingga tahun 2024 secara total berjumlah 57 orang terdiri atas 30 orang perempuan dan 27 orang laki-laki dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (P3K) berjumlah 53 orang (25 orang laki-laki dan 28 orang perempuan). Berdasarkan komposisi umur, data PNS Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah terdistribusi sebagaimana tercantum pada Grafik 2.1.

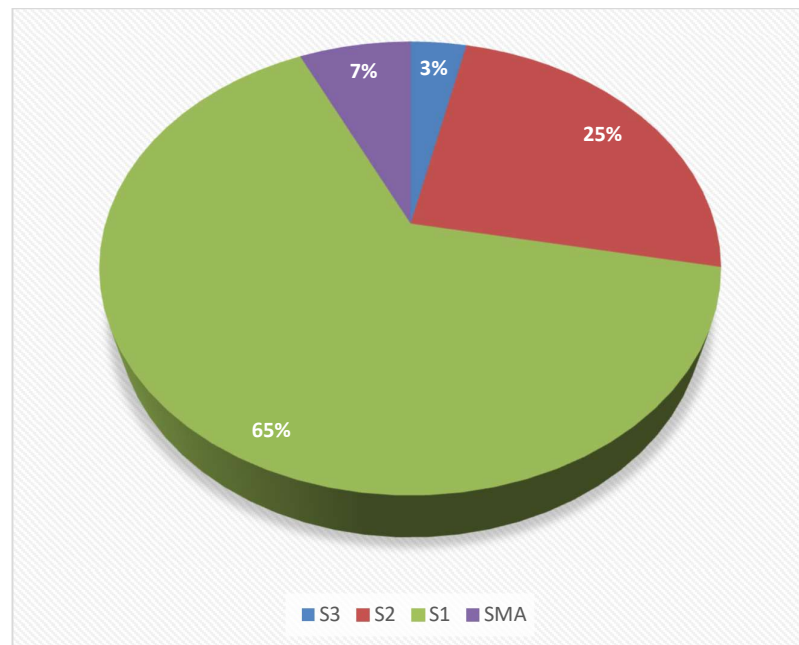
Grafik 2.1. Komposisi Umur PNS Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025



Sumber : DLH Provinsi Sulawesi Tengah, 2024

Ditinjau dari aspek tingkat pendidikan, Sarjana Strata Satu mendominasi PNS yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah yakni 34 orang sebagaimana tersaji pada Grafik 2.2.

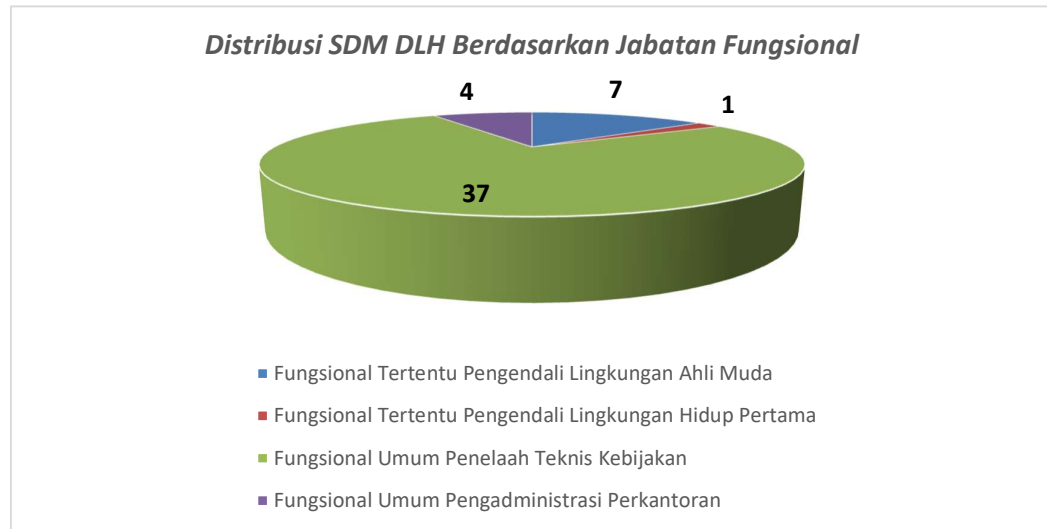
Grafik 2.2. Distribusi SDM Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal Tahun 2024



Sumber : DLH Provinsi Sulawesi Tengah, 2024

Sebagaimana Dinas lainnya yang bergerak di bidang khusus, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki jabatan fungsional, baik fungsional khusus dan fungsional umum seperti halnya tercantum pada Grafik 2.3

Grafik 2.3. Distribusi SDM DLH Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jabatan Fungsional



Sumber : DLH Provinsi Sulawesi Tengah, 2024

Sumber daya lainnya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah dalam menunjang tugas dan fungsinya adalah berbagai asset yang terdistribusi pada berbagai Bidang di Dinas ini sebagaimana tercantum pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Daftar Asset yang Dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

I. Tanah dan Bangunan

No	Uraian	Luas Tanah (M ²)	Status Kepemilikan	Kondisi	Keterangan
1	Sebidang Tanah Kantor	--	Milik Pemda Sulteng	--	



No	Uraian	Luas Tanah (M ²)	Status Kepemilikan	Kondisi	Keterangan
2	Bangunan Kantor	1.722.	Milik Pemda Sulteng	Baik	
3	Sebidang Tanah UPT Laboratorium	--	Milik Pemda Sulteng	--	
4	Bangunan Kantor UPT Laboratorium	744	Milik Pemda Sulteng	Baik	

II. Kendaraan Operasional

No	Bidang	Jenis Kendaraan	Jumlah	Kondisi	
				Baik	Rusak
1	Sekretariat	Roda 4	5 Unit	5	-
		Roda 2	8 Unit	8	-
2	Bidang Tata Lingkungan	Roda 4	1 Unit	1	-
		Roda 2	1 Unit	1	-
3	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Roda 4	1 Unit	1	-
		Roda 2	2 Unit	2	-
4	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Roda 4	1 Unit	1	-
		Roda 2	2 Unit	2	-
5	UPT Laboratorium Lingkungan	Roda 4	1 Unit	1	-
		Roda 2	1 Unit	1	-

III. Perlengkapan Kantor



No.	Nama/Jenis	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Bagus	Rusak	
1	Meja Kerja	116	116	-	
2	Kursi Kerja	214	177	37	
3	Kursi Tamu	1	1	-	
4	Lemari Besi Tinggi	38	37	1	
5	Dispenser	13	13	-	
6	Komputer	22	22	-	
7	Laptop	30	30	-	
8	Printer	28	28	-	
9	AC Unit	27	27	-	
10	AC Standing	3	3	-	
11	Camera Digital	5	5	-	
12	Video Shooting	2	2	-	
13	Scanner	2	-	2	
14	Mesin Fotocopy	1	-	1	
15	Mesin Potong Rumput	4	4	-	
16	GPS	2	2	-	
17	UPS	19	19	-	
18	CCTV	5	5	-	



No.	Nama/Jenis	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Bagus	Rusak	
19	TV	5	4	1	
20	Drone	1	1	-	
21	Proyektor	1	1	-	
22	Sound System	1	1	-	
23	Brankas	2	2		
24	Faksimile	1	1		
25	Hardisk	3	3		
26	Alat Pemadam/Tangga	4	4		
27	<i>Exhaust Fan</i>	4	4		
28	DAP air	2	2		
29	Treng Air	2	2		
30	Profil/Viber Glass	1	1		

Sumber : DLH Provinsi Sulawesi Tengah, 2024

IV. Alat Laboratorium

No	Nama/Jenis	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Bagus	Rusak	
1	Neraca Analitik	1	1	-	
2	Spektrofotometer Vis	1	1	-	
3	<i>Spektrofotometer UV-Vis</i>	2	2	-	



No	Nama/Jenis	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Bagus	Rusak	
4	Oven	2	1	1	
5	<i>Macnetik Stirer With Hot Plate</i>	3	1	2	
6	Baromoeter	1	1	-	
7	Gas Sampler Impinger	1	1	-	
8	pH/ther. Meter Portable	3	2	1	
9	<i>Conductivity/salinity Meter</i>	2	2	-	
10	Turbidimeter	1	1	-	
11	Lemari Asam	1	1	-	
12	<i>Thermoreactor COD</i>	1	1	-	
13	<i>Heating Mantles</i>	2	2	-	
14	Klorinmeter	2	2	-	
15	BOD Inkubator	1	1	-	
16	Flowatch	2	2	-	
17	Pompa Vacuum	2	1	1	
18	Timbangan	1	1	-	
19	<i>Water Purifier</i>	1	1	-	
20	Autoklaf	1	-	1	
21	Inkubator	1	1	-	



No	Nama/Jenis	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Bagus	Rusak	
22	<i>Laminar Air Flow</i>	1	1	-	
23	<i>Colony Counter</i>	1	1	-	
24	Mikroskop	1	-	1	
25	<i>Depth Sounder</i>	1	1	-	
26	<i>Water Sampler Horizontal</i>	2	1	1	
27	Alat Kebisingan	1	1	-	
28	Kulkas Laboratorium	1	1	-	
29	Anemometer	1	1	-	
30	<i>Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)</i>	1	-	1	
31	<i>Bench Top pH Meter</i>	1	-	1	
32	CO Meter	1	1	-	
33	Humidifier	1	1	-	
34	<i>Thermohygrometer</i>	10	9	1	
35	<i>Thermohygrometer (Outdoor)</i>	2	2	-	
36	<i>Water Bath</i>	2	2	-	-
37	COD Reaktor	1	1	-	

Sumber : DLH Provinsi Sulawesi Tengah, 2024



2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja penyelenggaraan pelayanan pada perangkat daerah tidak hanya menjadi ukuran efisiensi internal, tetapi merupakan cerminan langsung dari pemenuhan kewajiban pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Urusan Wajib non Layanan Dasar, khususnya di bidang Lingkungan Hidup. Aspek layanan umum dalam urusan ini seperti penerbitan perizinan, pengawasan, penegakan hukum, dan pelibatan masyarakat merupakan ujung tombak untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pencapaian kinerja pelayanan yang tertuang dalam tabel berikut menjadi indikator krusial untuk menilai sejauh mana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah telah menjalankan Tugas dan Fungsi -nya secara efektif. Setiap capaian dalam indikator kinerja ini pada hakikatnya adalah kontribusi nyata terhadap pelestarian daya dukung lingkungan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan pencapaian target pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan. Tabel 2.4 menyajikan capaian kinerja layanan Dinas Lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2025, sedangkan Tabel 2.5 menyajikan realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah untuk kurun waktu tersebut.

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Kualitas Air	62,70	65,29	65,39	65,49	65,59	55,84	57,71	63,63	61,63		0,89	0,88	0,97	0,94	
Indeks Kualitas Udara	90,27	90,38	90,49	90,59	90,69	91,33	91,86	91,88	93,09		1,01	1,02	1,02	1,03	
Indeks Kualitas Air Laut	70,02	70,62	71,21	71,81	72,40	87,36	88,42	79,81	79,08		1,25	1,25	1,12	1,10	
Emisi GRK (ton CO ₂ eq)	181059,86	187294,85	193449,42	199684,41	205987,71	23129,83	14502,34	13152,28	31343,76		0,13	0,08	0,07	0,16	

Tabel 2.5 Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Dinas Lingkungan Hidup	14.793.465.136	16.782.065.251	14.027.450.067	15.254.296.989,58		13.949.596.941	16.119.741.247	12.252.674.836	13.603.658.886		0,94	0,96	0,87	0,89		0,03	-0,02



2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan Dinas Lingkungan Hidup umumnya meliputi masyarakat luas, sektor usaha dan pemerintahan. Sasaran ini bertujuan untuk mencapai keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup serta membangun kesadaran dan aksi nyata dalam melindungi dan memelihara lingkungan.

- a. Masyarakat luas : pemangku kepentingan ini meliputi seluruh penduduk yang tinggal di daerah, termasuk warga perorangan, kelompok masyarakat, organisasi non-pemerintah (LSM), dan komunitas lokal. Sasaran layanan untuk masyarakat luas mencakup penyediaan informasi, edukasi, sosialisasi, fasilitas dan partisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan.
- b. Sektor Usaha : pemangku kepentingan ini meliputi dunia industri dan bisnis lainnya yang beroperasi dalam kelompok sasaran layanan untuk sektor usaha meliputi regulasi, pengawasan, insentif dan fasilitasi terkait dengan pengawasan lingkungan.
- c. Pemerintahan : pemangku kepentingan ini meliputi pemerintah daerah, pemerintah pusat dan perangkat daerah terkait, seperti Dinas PUPR, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan, Perhubungan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM, dan lainnya. Sasaran layanan untuk pemerintahan meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, koordinasi dan sinkronisasi program lingkungan hidup.



2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam upaya mewujudkan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup secara baik, maka berbagai tantangan dan peluang akan berkontribusi di dalamnya. Tantangan merupakan faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan bagi aspek pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan sebaliknya peluang merupakan suatu kondisi lingkungan eksternal yang menguntungkan bahkan menjadi formulasi dalam Dinas Lingkungan Hidup khususnya ditinjau dari pelayanan.

Tantangan

1. Meningkatnya degradasi dan alih fungsi lahan
2. *Illegal logging* dan *illegal fishing*
3. Pemanasan global
4. Kesadaran dan kapasitas masyarakat dan dunia usaha yang bervariasi dalam hal pengelolaan lingkungan
5. Pencemaran lingkungan (air dan udara)
6. Belum optimalnya pengelolaan limbah B3
7. Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan
8. Pengelolaan sampah yang belum optimal
9. Tingginya ancaman terhadap punahnya keanekaragaman hayati
10. Fasilitas kantor yang belum memadai karena hilang dan rusak berat akibat gempa bumi dan tsunami.



Peluang

1. Potensi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati
2. Regulasi yang mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
3. Dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah
4. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Swasta dan NGO
5. Tingginya kebutuhan masyarakat akan lingkungan hidup yang bersih dan berkualitas
6. Perkembangan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

Pemanfaatan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat dengan tetap berpegang pada kaidah-kaidah kelestarian lingkungan hidup dan berkelanjutan. Penciptaan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup merupakan prasyarat penting bagi terlaksananya pembangunan berkelanjutan. Tantangan utama yang harus dijawab oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah ke depan dalam rangka mendukung terselenggaranya pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana menjaga dan mempertahankan kelestarian ragam hayati dari setiap ruang yang dimanfaatkan untuk pembangunan tidak pernah berkurang, baik populasi maupun nilainya. Sehingga, setiap upaya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah ke depan pada akhirnya dapat memberikan keyakinan kepada generasi mendatang bahwa pada saatnya nanti, setiap sumber daya hayati di dalam ruang yang dimanfaatkan untuk pembangunan saat



ini, tidak berubah ketika generasi mendatang akan memanfaatkannya. Berpijak pada pemahaman ini maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah harus mampu meyakinkan para pengambil kebijakan dan para pelaku pembangunan untuk menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang agar kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga, diantaranya melalui perumusan rencana strategis pembangunan lingkungan hidup yang terstruktur dan jelas pelaksanaannya.

Setiap rencana pembangunan dapat direncanakan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien manakala dibarengi dengan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang memengaruhi keberhasilan rencana pembangunan tersebut. Kondisi atau aspek yang dampaknya signifikan, perlu dirumuskan menjadi isu strategis dan di kedepankan untuk dicarikan solusi inovatif terbaik dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka pemanfaatan setiap peluang yang ada secara optimal guna mengantisipasi setiap kemungkinan terjadinya kegagalan dalam eksekusi rencana yang telah dirumuskan sehingga bukan manfaat yang diperoleh melainkan kerugian yang lebih besar. Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan permasalahan pembangunan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan yang disajikan dalam Rencana Strategis ini diperoleh dari hasil identifikasi Rancangan Awal RPJMD dan Laporan KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan



perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.

Adapun isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Identifikasi dan penetapan isu strategis dapat dilihat dari lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal. Lingkungan eksternal terkait dengan dinamika nasional, provinsi, perangkat daerah, dan lembaga atau instansi di luar organisasi. Dinamika regional dan nasional secara sederhana dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah provinsi maupun nasional. Sedangkan lingkungan internal terkait dengan dinamika di dalam organisasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, identifikasi dan analisis terhadap permasalahan dan isu strategis merupakan suatu keharusan guna mengurai dan memahami berbagai persoalan yang terjadi untuk dicarikan solusi inovatif terbaik.



2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah:

1. Kualitas sumberdaya aparatur baik perencanaan dan teknis yang memiliki kompetensi lingkungan hidup masih terbatas;
2. Partisipasi stakeholder dalam pengelolaan lingkungan belum optimal, ditandai dengan sedikitnya kelompok peduli lingkungan dan terhambatnya pengembangan percontohan.
3. Komitmen pengambil keputusan terhadap lingkungan hidup masih rendah karena dipandang sebagai pendukung, bukan prioritas, sehingga kelembagaan dan anggarannya terbatas;
4. Para pelaku usaha, pengambil kebijakan, dan masyarakat umumnya masih berasumsi bahwa praktik ramah lingkungan berbiaya tinggi, mengurangi keuntungan, dan menghambat investasi;
5. Aktivitas transportasi yang meningkat seiring pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan memburuknya kualitas udara akibat pencemaran CO, NOx, dan HC;
6. Belum diterapkannya konsep 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*), khususnya di wilayah perkotaan sehingga terjadi peningkatan limbah cair, padat dan B3 baik domestik maupun industri,
7. Terbatasnya ruang terbuka hijau (RTH).
8. Potensi bencana yang cukup tinggi yang meliputi gempa bumi, tanah longsor, krisis air (kekeringan, banjir, tercemar) dan pengurasan berlebihan air tanah;

- 
9. Belum optimalnya koordinasi integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
 10. Belum tersusunnya perencanaan pengelolaan lingkungan yang lengkap dan menyeluruh yang menjadi dasar penyusunan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 11. Belum optimalnya penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang lingkungan hidup;
 12. Masih terbatasnya fasilitas pengelolaan lingkungan termasuk fasilitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 13. Masih terbatasnya *data base* (basis data) dan/atau informasi lingkungan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan di bidang lingkungan.
 14. Degradasi lahan dan kerusakan tanah akibat deforestasi, alih fungsi lahan, desertifikasi dan kekeringan (karena over-eksploitasi air tanah, dan perubahan iklim), degradasi lahan pertanian, erosi dan sedimentasi;
 15. Meningkatnya pencemaran akibat pengelolaan limbah (cair, padat dan gas) belum optimal;
 16. Adanya degradasi dan pencemaran di wilayah pesisir dan laut.;
 17. Tingginya tingkat kerusakan daerah aliran sungai (DAS) Sulawesi Tengah;
 18. Menurunnya kuantitas/debit badan air (sungai/air tanah) dan kualitas sumber air baku;
 19. Pelestarian sumberdaya hayati dan cagar alam serta kearifan lokal (*local wisdom*) yang belum optimal;

- 
20. Pencemaran lingkungan yang kompleks pada areal pertambangan akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan;
 21. Belum optimalnya peran stakeholder dalam aksi penanganan perubahan iklim sehingga berkontribusi terhadap tingginya emisi gas rumah kaca di Sulawesi Tengah

2.2.2 Isu Strategis

Isu - isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah deskripsi mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, analisa isu-isu strategis adalah bagian yang terpenting. Dari hasil analisa isu yang tepatlah, prioritas pembangunan dapat dijalankan dan dipertanggung jawabkan. Isu strategis didapatkan dari analisa internal berupa identifikasi permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi maupun dari analisa eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan juga ancaman di 5 (lima) tahun mendatang. Adapun isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan dan keterkaitannya dengan permasalahan dan isu lainnya disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1.	Potensi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati	Belum tersusunnya perencanaan pengelolaan lingkungan yang lengkap dan menyeluruh Masih terbatasnya fasilitas pengelolaan lingkungan termasuk fasilitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Pelestarian sumberdaya hayati dan cagar alam serta kearifan lokal (<i>local wisdom</i>) yang belum optimal;	Peningkatan kualitas dan daya saing sektor unggulan daerah, serta infrastruktur penghubung antar wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian fiskal	Peningkatan persaingan dan pemanfaatan sumber daya alam	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara Berbasis Sumber Daya Alam	Penguatan Tata Kelola dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam Berkelanjutan untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kesejahteraan Daerah



No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
2.	Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup	Belum tersusunnya perencanaan pengelolaan lingkungan yang lengkap dan menyeluruh Degradasi lahan dan kerusakan tanah akibat deforestasi, alih fungsi lahan, desertifikasi dan kekeringan degradasi lahan pertanian, erosi dan sedimentasi Meningkatnya pencemaran akibat pengelolaan limbah belum optimal Menurunnya kuantitas/debit badan air (sungai/air tanah) dan kualitas sumber air baku; Pencemaran lingkungan yang kompleks pada areal pertambangan akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan;	Peningkatan ketahanan ekologi, mitigasi dan kemampuan adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim	Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pengembangan Ekonomi Lokal Dan Perlindungan Lingkungan	Ketahanan Ekologis melalui Pengendalian Degradasi dan Pencemaran Lingkungan untuk Mendukung Ketahanan Nasional dan Pembangunan Berkelanjutan



No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
	Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Potensi bencana yang cukup tinggi yang meliputi gempa bumi, tanah longsor, krisis air (kekeringan, banjir, tercemar) dan pengurusan berlebihan air tanah; Belum tersusunnya perencanaan pengelolaan lingkungan yang lengkap dan menyeluruh yang menjadi dasar penyusunan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Masih terbatasnya fasilitas pengelolaan lingkungan termasuk fasilitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Belum optimalnya peran stakeholder dalam aksi penanganan perubahan iklim sehingga berkontribusi terhadap tingginya emisi gas rumah kaca	Peningkatan ketahanan ekologi, mitigasi dan kemampuan adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim	• Perubahan Iklim • Perkembangan Demografi Global	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana alam (gempa, tsunami, banjir dan likuefaksi)	Tata Kelola dan Kapasitas Adaptif untuk Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim



No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
	Regulasi dan Kebijakan yang Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan	Kualitas sumberdaya aparatur baik perencanaan dan teknis yang memiliki kompetensi lingkungan hidup relatif terbatas; Partisipasi stakeholder dalam pengelolaan lingkungan belum optimal; Komitmen pengambil keputusan terhadap lingkungan hidup masih rendah; Para pelaku usaha, pengambil kebijakan, dan masyarakat umumnya masih berasumsi bahwa praktik ramah lingkungan berbiaya tinggi, mengurangi keuntungan, dan menghambat investasi; Belum optimalnya koordinasi integrasi, sinkronisasi, dan sinergi	Peningkatan penyelenggaraa n tata kelola pemerintahan Peningkatan ketahanan ekologi, mitigasi dan kemampuan adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim	Perubahan Iklim	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatal Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Pengemba ngan Ekonomi Lokal Dan Perlindung an Lingkung an	Belum Efektifnya Regulasi, Kebijakan, dan Infrastruktur Lingkungan Hidup dalam Menghadapi Perubahan Iklim dan Bencana Ekologis



No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
		baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; Belum optimalnya penegakan hukum (<i>law enforcement</i>) di bidang lingkungan hidup; Masih terbatasnya <i>data base</i> (basis data) dan/atau informasi lingkungan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan di bidang lingkungan					



No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
	Peran Strategis DLH untuk Menjaga dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Terbatasnya ruang terbuka hijau (RTH). Belum diterapkannya konsep 3R khususnya di wilayah perkotaan Meningkatnya pencemaran akibat pengelolaan limbah (cair, padat dan gas) belum optimal; Pencemaran lingkungan yang kompleks pada areal pertambangan akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan; Belum optimalnya peran stakeholder dalam aksi penanganan perubahan iklim sehingga berkontribusi terhadap tingginya emisi gas rumah kaca di Sulawesi Tengah	Peningkatan ketahanan ekologi, mitigasi dan kemampuan adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim	Perubahan Iklim Perkembangan Demografi Global	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana alam (gempa, tsunami, banjir dan likuefaksi)	Belum Optimalnya Keterlibatan Multipihak dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan



Berdasarkan Tabel 2.2 uraian dari isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam Berkelanjutan untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kesejahteraan Daerah

Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi yang kaya akan berbagai sumber daya alam yang disertai dengan potensi keanekaragaman hayati yang tinggi karena letaknya di kawasan Wallacea yang merupakan zona peralihan antara zona fauna Asia dan Australia. Potensi yang besar ini idealnya ditunjang oleh tata kelola yang optimal sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Rumusan isu ini tidak hanya fokus pada aspek konservasi, akan tetapi menghubungkan berbagai dimensi, seperti dimensi ekonomi dalam bentuk nilai tambah dan daya saing daerah, dimensi social berupa kesejahteraan masyarakat serta dimensi lingkungan sebagai sumber daya alam berkelanjutan. Isu strategis ini dapat diturunkan dalam berbagai program seperti rencana induk pengelolaan sumber daya alam terpadu, pengembangan ekonomi sirkular dan hilirisasi produk berbasis sumber daya alam lokal, penguatan infrastruktur dan regulasi untuk mendukung ekonomi hijau.

2. Ketahanan Ekologis melalui Pengendalian Degradasi dan Pencemaran Lingkungan untuk Mendukung Ketahanan Nasional dan Pembangunan Berkelanjutan

Isu ini secara langsung menargetkan masalah utama yang dihadapi, yaitu degradasi lahan, pencemaran lingkungan yang kompleks, dan menurunnya kualitas air. Hal ini merupakan ancaman terhadap Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah. Konsep ketahanan ekologis merupakan fondasi untuk mencapai swasembada pangan, energi dan air serta ekonomi hijau dan ekonomi biru yang



menjadi isu nasional. Ketahanan lingkungan adalah prasyarat bagi ketahanan nasional. Rumusan isu ini bersifat progresif dan integratif. Rumusan ini tidak hanya reaktif untuk mengatasi pencemaran tetapi juga proaktif dengan menekankan pada penguatan ketahanan (*resilience*). Ini mencakup upaya preventif, adaptif, dan restoratif. Isu strategis ini mudah diterjemahkan ke dalam berbagai program seperti rehabilitasi lahan kritis dan daerah aliran sungai (DAS), pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah, penguatan sistem early warning untuk bencana hidrometeorologi, serta integrasi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dalam perencanaan tata ruang dan sektoral. Dinas Lingkungan Hidup merupakan aktor kunci dalam menjaga fondasi alamiah pembangunan, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan ketahanan nasional dibangun di atas dasar ekologis yang kuat dan berkelanjutan.

3. Tata Kelola dan Kapasitas Adaptif untuk Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Isu strategis ini dibangun dari potensi relisensi terhadap bencana dan perubahan iklim sekaligus menanggapi ancaman nyata berupa potensi bencana yang tinggi di wilayah provinsi Sulawesi Tengah. Tata kelola dan fasilitas yang terbatas serta keterlibatan stakeholder yang belum optimal menjadi dasar dalam perumusan isu ini. Isu ini tidak hanya fokus pada penanggulangan bencana (*reactive*) tetapi lebih menekankan pada pembangunan ketahanan (*resilience*) dan kapasitas adaptif (*adaptive capacity*). Ini adalah pendekatan yang lebih maju, yang mengakui bahwa perubahan iklim dan bencana adalah realitas baru yang harus diadaptasi. Pendekatan ini memadukan aspek fisik (infrastruktur), hukum (penegakan), dan sosial (peran stakeholder). Dinas Lingkungan Hidup bukan hanya sebagai responder bencana, tetapi sebagai *leading sector* dalam membangun ketahanan daerah melalui perencanaan tata ruang berbasis risiko, pengendalian pencemaran (yang berkontribusi pada GRK),



dan memobilisasi semua pemangku kepentingan sehingga menjadikan provinsi Sulawesi Tengah menjadi lebih tangguh.

4. Belum Efektifnya Regulasi, Kebijakan, dan Infrastruktur Lingkungan Hidup dalam Menghadapi Perubahan Iklim dan Bencana Ekologis

Isu ini mengidentifikasi tiga kelemahan fundamental (regulasi, kebijakan, dan infrastruktur) yang menyebabkan ketidaksiapan sistem pengelolaan lingkungan hidup dalam mengantisipasi dan menanggapi dampak perubahan iklim serta bencana ekologis. Ketidakefektifan ini menciptakan kerentanan sistemik yang mengancam ketahanan daerah. Isu ini terumuskan dari berbagai permasalahan seperti regulasi yang reaktif dan terfragmentasi, yang disebabkan peraturan masih bersifat responsif terhadap kejadian bukan pencegahan serta tersebar di berbagai peraturan sektoral tanpa integrasi yang kuat. Lemahnya *law enforcement* terhadap pelanggaran lingkungan, khususnya yang berkontribusi pada kerentanan iklim (seperti alih fungsi lahan gambut, deforestasi, dll). Selain itu belum diadopsi secara menyeluruh instrumen kebijakan progresif seperti pajak karbon, perdagangan emisi, atau standar ketahanan iklim untuk infrastruktur. Dari aspek kebijakan, perencanaan yang belum berbasis risiko iklim yang secara sistematis menginternalisasikan proyeksi kerentanan iklim dan analisis risiko bencana ekologis. Koordinasi lintas sektor juga masih lemah serta alokasi anggaran yang belum pro-adaptasi terhadap perubahan iklim dan peningkatan ketahanan bencana

5. Belum Optimalnya Keterlibatan Multipihak dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Isu ini menyoroti kegagalan dalam membangun kolaborasi yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan komunitas lainnya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Keterlibatan yang ada masih bersifat simbolis, sporadis, dan tidak terstruktur sehingga program lingkungan seringkali kurang berdampak dan tidak berkelanjutan.



Dari aspek pemerintah, biasanya pendekatan *top-down* masih ditemui tanpa melibatkan pemangku kepentingan sejak awal, kurangnya *platform* kolaboratif dan kapasitas fasilitas yang terbatas. Dari sektor swasta masih ditemui pendekatan CSR yang tidak strategis, kepatuhan yang minimalis dimana perusahaan cenderung hanya memenuhi standar minimum regulasi serta minimnya keterbukaan data lingkungan dari perusahaan ke publik. Dari aspek masyarakat seperti keterlibatan yang reaktif baru terlihat setelah terjadi lingkungan, kesenjangan pengetahuan dan kapasitas yang tidak merata, partisipasi semu dimana keterlibatan masyarakat sering terbatas pada sosialisasi bukan pengambilan keputusan, keterbatasan akses informasi sehingga masyarakat kesulitan mengakses data lingkungan yang komprehensif serta *mindset* ketergantungan yakni pola pikir menunggu intervensi pemerintah masih kuat, memberikan kontribusi terhadap lemahnya keterlibatan multipihak dalam pengelolaan lingkungan hidup. Isu ini menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi pada kualitas kolaborasi antara semua aktor yang berkepentingan.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra PD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan misi pembangunan daerah ke 3 yaitu: mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor, Dinas Lingkungan Hidup bertanggungjawab terhadap tujuan 1 dari Misi 3 yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup. Tujuan Daerah tersebut diturunkan menjadi tujuan Perangkat Daerah yaitu Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah dan Menurunkan Intensitas Emisi GRK Menuju Net Zero Emission.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029

Adapun sasaran renstra yang merupakan penjabaran dari tujuan penyusunan renstra DLH adalah :

1. Terwujudnya Pengurangan Risiko dan Dampak Negatif Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Keanekaragaman Hayati;
2. Meningkatnya Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati;
3. Menurunnya Emisi GRK yang Terverifikasi dari sektor limbah.

3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Renstra 2025-2029 adalah proses transformasi tujuan makro RPJMD menjadi aksi-aksi mikro yang terukur, terprogram, dan bertanggung oleh setiap unit kerja. Keberhasilannya sangat bergantung pada ketepatan analisis, keselarasan dengan RPJMD, kualitas perumusan strategi, dan yang terpenting, komitmen kuat dari seluruh jajaran pemerintahan daerah untuk melaksanakannya secara konsisten dan akuntabel. Strategi Perangkat Daerah harus selaras, sinergis, dan mendukung langsung tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD. Secara ringkas tujuan, sasaran dan strategi Renstra DLH tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran dan Strategi Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah dan Menurunkan Intensitas Emisi GRK Menuju Net Zero Emission	Meningkatnya Keanekaragaman Hayati Daerah	Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Propinsi
	Menurunnya Emisi GRK yang Terverifikasi pada Sektor Limbah	Meningkatkan tata kelola persampahan
	Terwujudnya Pengurangan Risiko dan Dampak Negatif Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Keanekaragaman Hayati	Menurunkan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup
		Meningkatkan efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP
		Meningkatkan kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang



Tujuan	Sasaran	Strategi
		diterbitkan
		Meningkatkan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH
		Meningkatkan kapasitas SDM bidang lingkungan hidup
		Meningkatkan kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
		Meningkatkan penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup
		Meningkatkan penanganan bahan berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Pelaksanaan strategi dilakukan secara bertahap untuk mencerminkan cara kerja yang terukur, bijaksana, dan bertanggung jawab. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber daya yang terbatas, belajar dari pengalaman, membangun fondasi yang kuat, mengelola perubahan, memastikan akuntabilitas, dan yang terpenting, meminimalkan risiko kegagalan untuk mencapai tujuan akhir Renstra 2025-

2029 secara lebih pasti dan berkelanjutan. Implementasi strategi dilaksanakan dengan tahapan seperti tercantum pada Tabel 3.2. berikut :

Tabel 3.2. Tahapan Pelaksanaan Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Tujuan: Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah dan Menurunkan Intensitas Emisi GRK Menuju <i>Net Zero Emission</i>				
Sasaran: Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah				
Pemetaan potensi keanekaragaman hayati dan kawasan lindung	Penyusunan kebijakan perlindungan dan pemanfaatan spesies lokal	Penguatan peran masyarakat dalam konservasi berbasis kearifan lokal	Peningkatan kawasan perlindungan melalui kolaborasi lintas sektor	Penerapan sistem konservasi terintegrasi dengan perencanaan wilayah
Penataan akses masyarakat terhadap sumber daya hayati	Pembentukan bank plasma nutfah daerah	Pengembangan pusat edukasi keanekaragaman hayati di sekolah dan komunitas	Penguatan regulasi perlindungan flora dan fauna endemik	Pengembangan jejaring konservasi dengan mitra nasional dan internasional
Sasaran: Menurunnya Intensitas Emisi GRK Menuju <i>Net Zero Emission</i>				
Penetapan target penurunan emisi berdasarkan sektor utama	Pemanfaatan energi surya dan biogas di kawasan perdesaan	Penerapan teknologi efisiensi energi di kawasan industri	Pengembangan insentif daerah untuk aktivitas rendah karbon	Replikasi model transisi energi bersih ke daerah terpencil
Pengembangan program penanaman pohon masif di wilayah terdegradasi	Penggunaan kendaraan listrik untuk layanan publik secara bertahap	Konversi pemanas dan kompor rumah tangga ke energi ramah lingkungan	Penerapan teknologi rendah karbon dalam pembangunan infrastruktur	Integrasi sistem inventarisasi emisi dalam perencanaan pembangunan daerah



Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

Arah kebijakan perangkat daerah berfungsi untuk yang menterjemahkan visi dan misi dalam RPJMD menjadi langkah-langkah konkret yang dapat dipahami dan dijalankan oleh setiap unit kerja dan pegawai. Arah kebijakan inilah yang memastikan bahwa seluruh sumber daya organisasi mengalir ke tujuan yang sama. Arah kebijakan ini menjadi panduan untuk mengambil keputusan yang konsisten dengan tujuan strategis. Perumusan arah kebijakan ini memerlukan pemikiran yang mendalam, analisis yang cermat, dan partisipasi yang luas untuk memastikan bahwa setiap langkah perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup dapat menunjang tercapainya Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025-2029.

Tabel 3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DLH Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD DLH	KET.
1.		Peningkatan kualitas dan pengelolaan ekosistem darat dan laut yang terintegrasi	1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Konservasi Ekosistem Darat; 2. Pengelolaan Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang Berkelanjutan	



NO	OPERASI ONALISA SI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD DLH	KET.
			untuk Mengurangi Beban Pencemaran ke Darat dan Laut; 3. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Wilayah Pesisir dan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai Jalur Kritis Hubungan Darat-Laut.	
2.		Pengelolaan Cagar Biosfer secara berkelanjutan	1. Perlindungan dan Pemulihan Kualitas Ekosistem pada Zona Inti dan Zona Penyangga Cagar Biosfer; 2. Pengelolaan Dampak Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan di Zona Transisi Cagar Biosfer; 3. Penguatan Sistem Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati di Seluruh Zona Cagar Biosfer; 4. Koordinasi, Integrasi, dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Cagar Biosfer yang Kolaboratif.	
		Peningkatan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular	1. Penguatan Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah di Sumber melalui Prinsip 6R (<i>Reduce, Reuse, Recycle, Replace, Replant and Recovery</i>); 2. Pengembangan Sistem Pengumpulan, Pemilahan, dan Daur Ulang Sampah yang Efisien dan Terintegrasi;	



NO	OPERASI ONALISA SI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD DLH	KET.
			3. Peningkatan Kapasitas dan Nilai Ekonomi Pengolahan Sampah Menjadi Produk yang Bernilai; 4. Penguatan Kemitraan Pentahelix serta Penerapan Inovasi Teknologi dalam Pengelolaan Sampah Sirkular.	
		Pengelolaan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	1. Penyusunan dan pengendalian pelaksanaan RPPLH; 2. Pengawasan izin PPLH 3. Melaksanakan pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup; 4. Pelayanan pengaduan dan apresiasi terhadap masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup; 5. Pencegahan pencemaran lingkungan; 6. Penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan; 7. Optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Persampahan Regional	
		Penurunan emisi GRK pada sektor FOLU/Lahan, Energi, IPPU dan Limbah	1. Pengembangan sistem Pengelolaan Limbah yang Efisien 2. Pemanfaatan teknologi pemantauan emisi 3. Pengembangan teknologi pengelolaan limbah	



NO	OPERASI ONALISA SI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD DLH	KET.
		Pengembangan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan	1. Perlindungan, Pemulihan, dan Penguatan Ketahanan Populasi Species Kunci serta Ekosistem Esensial; 2. Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati secara Lestari untuk Kesejahteraan Masyarakat melalui Bio-ekonomi dan Jasa Lingkungan; 3. Penguatan Sistem Database, Pemantauan, dan Penelitian Keanekaragaman Hayati sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan; 4. Penguatan Tata Kelola, Koordinasi Lintas Sektor, dan Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.	
		Perlindungan keanekaragaman hayati melalui edukasi, konservasi lokal, dan jejaring mitra nasional	1. Penyusunan dan pengendalian pelaksanaan RPPLH 2. Penyusunan dan pelaksanaan KLHS 3. Penyusunan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 4. Penyediaan RTH	
		Pemberian mekanisme insentif bagi kabupaten/kota atau pihak swasta yang berkontribusi dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	1. Penyusunan dan Pengembangan Regulasi serta Kriteria Teknis Pemberian Insentif untuk Berbagai Bentuk Kontribusi Pelestarian Keanekaragaman Hayati;	



NO	OPERASI ONALISA SI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD DLH	KET.
			2. Fasilitasi dan Verifikasi Kinerja Kontribusi Kabupaten/Kota dan Pihak Swasta dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; 3. Pengelolaan dan Penyaluran Berbagai Bentuk Insentif (Fiskal, Non-Fiskal, dan Pengakuan) Berdasarkan Hasil Verifikasi Kinerja; 4. Pembangunan Sistem Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan yang Transparan dan Akuntabel untuk Seluruh Mekanisme Insentif;	
		Perlindungan hutan adat dan tanah ulayat	1. Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA dan Kearifan Lokal; 2. Fasilitasi Pengakuan, Pemetaan Partisipatif, dan Penetapan Hutan Adat serta Tanah Ulayat; 3. Penguatan Kapasitas Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat dan Tanah Ulayat yang Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal; 4. Integrasi Nilai-Nilai Konservasi dan Kearifan Lokal dalam Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan; 5. Penguatan Kolaborasi dan Penyelesaian Konflik Berbasis Mediasi antara Masyarakat Adat, Pemerintah, dan Pelaku	



NO	OPERASI ONALISA SI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD DLH	KET.
			Usaha	
		Penguatan dan pengelolaan masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau	1. Fasilitasi Pengakuan dan Pemetaan Partisipatif Wilayah Kelola dan Hak-Hak Masyarakat Adat/Lokal di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Ekosistem Pesisir yang Berkelanjutan (<i>Blue Economy</i>) dan Pengelolaan Limbah di Wilayah Kepulauan.	
		Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang, pengelolaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang	1. Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP); 2. Fasilitasi dan Perencanaan Rehabilitasi Lahan Kritis Pasca Tambang yang Tidak Memiliki Penanggung Jawab (Bekas Tambang Ilegal atau Tambang Lama); 3. Pengembangan dan Fasilitasi Model-Model Pemanfaatan Lahan Pasca Tambang yang Berkelanjutan dan Bernilai Ekonomi; 4. Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Manajemen Air Asam Tambang (AAT) serta Dampak Lingkungan Jangka Panjang di	



NO	OPERASI ONALISA SI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD DLH	KET.
			Kawasan Pasca Tambang.	
		Penguatan data, informasi dan iptek keanekaragaman hayati	1. Penyelenggaraan Inventarisasi, Pemantauan, dan Dokumentasi Keanekaragaman Hayati secara Berkala dan Sistematis; 2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Keanekaragaman Hayati Daerah yang Terintegrasi dan Mudah Diakses; 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Teknologi Modern dalam Pengumpulan dan Analisis Data Keanekaragaman Hayati; 4. Fasilitas Penelitian, Inovasi, dan Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Mendukung Konservasi dan Pemanfaatan Lestari Keanekaragaman Hayati;	
		Penguatan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem	1. Penyusunan dan Pemutakhiran Basis Data serta Indikator Kinerja Lingkungan Hidup yang Objektif dan Terukur sebagai Dasar Alokasi Transfer Anggaran; 2. Fasilitas, Verifikasi, dan Validasi Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Penerima Transfer Anggaran; 3. Koordinasi dan Sinergi Perencanaan Program antara Pemerintah	



NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD DLH	KET.
			Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Memastikan Efektivitas Penggunaan Dana Transfer; 4. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan atas Dampak Ekologi dan Tata Kelola Skema Transfer Anggaran Berbasis Ekologi.	
		Penguatan skema Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi kepada kabupaten/ kota	1.Fasilitasi, Verifikasi, dan Validasi Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sebagai Syarat Penyaluran Transfer Anggaran; 2. Koordinasi dan Sinergi Perencanaan Program antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Memastikan Efektivitas dan Keselarasan Penggunaan Dana Transfer; 3. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan atas Dampak Ekologi dan Tata Kelola Skema Transfer Anggaran Berbasis Ekologi secara Transparan dan Akuntabel;	
		Transisi energi bersih di wilayah terpencil serta efisiensi energi di industri dan rumah tangga	1. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari Sektor Limbah 2. Peningkatan Kualitas Udara melalui Pengendalian Pencemaran 3. Penguatan Infrastruktur Hijau dan Rendah Karbon 4. Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Transisi Energi 5. Integrasi Kebijakan	



NO	OPERASI ONALISA SI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD DLH	KET.
			Lingkungan dalam Perencanaan Energi dan Industri	
		Penguatan kebijakan pengelolaan ekonomi sirkular untuk mengurangi emisi di sektor limbah	1.Pengembangan Infrastruktur dan Sistem Pemilahan, Pengumpulan, dan Daur Ulang Sampah yang Efisien untuk Meningkatkan Nilai Ekonomi Material Sampah; 2.Inovasi dan Kemitraan Bisnis dalam Pemanfaatan Sampah Organik Menjadi Produk Bernilai ; 3.Pemantauan, Verifikasi, dan Pelaporan Kinerja Pengurangan Sampah serta Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Limbah	
		Kampanye perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui edukasi, sosialisasi, dan fasilitasi pemilahan sampah dari sumber secara berkelanjutan untuk mendukung pengurangan timbulan sampah dan peningkatan daur ulang.	1. Pengembangan dan Implementasi Strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang Kreatif, Terukur, dan Berkelanjutan untuk Seluruh Segmen Masyarakat; 2. Fasilitasi dan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Pemilahan Sampah dari Sumber yang Mudah Diakses dan Dijangkau Masyarakat; 3. Penguatan Ekosistem Daur Ulang melalui Kemitraan dengan Pelaku Usaha, Komunitas, dan Pemerintah Desa/Kelurahan; 4. Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi	



NO	OPERASI ONALISA SI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD DLH	KET.
			Berkelanjutan untuk Memastikan Efektivitas Program dan Menjaga Perilaku Baru Masyarakat.	
		Penguatan kebijakan insentif bagi industri dan komersil yang berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan	1. Penyusunan dan Pengembangan Regulasi serta Kriteria Teknis yang Jelas dan Terukur untuk Pemberian Insentif; 2. Fasilitasi Akses dan Verifikasi Teknis terhadap Investasi Teknologi Ramah Lingkungan yang Dilakukan oleh Industri dan Pelaku Komersil; 3. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan yang Transparan atas Dampak Insentif terhadap Kinerja Lingkungan dan Ekonomi	
		Penguatan upaya rehabilitasi dan pelestarian ekosistem perairan serta kawasan resapan air	1. Rehabilitasi dan Restorasi Ekosistem Perairan Darat dan Lahan Basah yang Terdegradasi; 2. Perlindungan dan Konservasi Kawasan Resapan Air serta Ekosistem Akuatik yang Masih Baik; 3. Pengendalian Beban Pencemaran yang Masuk ke Badan Air dan Kawasan Resapan Air; 4. Penguatan Tata Kelola, Koordinasi Lintas Sektor, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Terintegrasi Ekosistem Perairan dan Resapan Air.	
		Perlindungan dan	1. Implementasi Program	



NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD DLH	KET.
		pemulihan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi	Perlindungan dan Pengawasan Efektif untuk Mencegah Kerusakan dan Degradasi pada Area Bernilai Keanekaragaman Hayati Tinggi; 2. Restorasi dan Rehabilitasi Aktif pada Ekosistem dan Area Bernilai Keanekaragaman Hayati Tinggi yang Terdegradasi; 3. Penguatan Tata Kelola Kolaboratif dan Integrasi Nilai Keanekaragaman Hayati dalam Perencanaan Pembangunan Sektoral	
		Mengembangkan ekowisata berbasis konservasi di Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, dan Tolitoli untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian ekosistem	1. Penetapan dan Pemantauan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup di Destinasi Ekowisata Prioritas; 2. Penguatan Kapasitas Masyarakat dan Pelaku Usaha Lokal dalam Pengelolaan Ekowisata yang Bertanggung Jawab dan Ramah Lingkungan; 3. Integrasi Prinsip Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Restorasi Ekosistem dalam Perencanaan dan Operasionalisasi Destinasi Ekowisata.	



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program pada Perangkat daerah lingkungan hidup pada dokumen Rencana Strategis ini terdiri dari 10 Program, 14 kegiatan serta sub kegiatan diturunkan dari hasil cascading tujuan, sasaran, outcome serta output. Masing masing program, kegiatan serta sub kegiatan dirinci pada bagian dibawah ini.

4.1 Program

1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
2. Program Pengelolaan Persampahan
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
10. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

4.2 Kegiatan

1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
2. Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

- 
3. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 4. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 5. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 6. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
 7. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
 8. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
 9. Kegiatan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
 10. Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
 11. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi
 12. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
 13. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
 14. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

4.3 Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				15.590.560.891,88		16.860.921.128,65		18.094.601.667,86		19.475.068.411,55		21.023.767.442,59
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				12.963.054.291,88		14.013.737.064,65		15.054.916.237,86		16.120.565.222,55		17.010.523.593,59
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	66	70	12.963.054.291,88	72	14.013.737.064,65	74	15.054.916.237,86	76	16.120.565.222,55	78	17.010.523.593,59
2.11.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				41.488.000,00		48.000.000,00		48.000.000,00		48.000.000,00		133.000.000,00
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)	0	1	41.488.000,00	1	48.000.000,00	1	48.000.000,00	1	48.000.000,00	1	133.000.000,00
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	3		3		3		3		3	
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
2.11.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				17.038.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		105.000.000,00
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	3	17.038.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	105.000.000,00
2.11.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00
2.11.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11.450.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	11.450.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00
2.11.01.1.01.0009 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00
2.11.01.1.01.0012 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00
2.11.01.1.01.0013 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00
2.11.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.501.600.891,88		11.618.588.084,65		11.858.293.257,86		12.288.260.242,55		12.418.296.613,59
Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	65	109	10.501.600.891,88	109	11.618.588.084,65	109	11.858.293.257,86	109	12.288.260.242,55	109	12.418.296.613,59
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	0		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	0		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	0		1		1		1		1	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
2.11.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.590.560.891,88		10.698.548.084,65		10.938.253.257,86		11.368.220.242,55		11.498.256.613,59
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	65	109	9.590.560.891,88	109	10.698.548.084,65	109	10.938.253.257,86	109	11.368.220.242,55	109	11.498.256.613,59
2.11.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				884.040.000,00		884.040.000,00		884.040.000,00		884.040.000,00		884.040.000,00
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	884.040.000,00	1	884.040.000,00	1	884.040.000,00	1	884.040.000,00	1	884.040.000,00
2.11.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00
2.11.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00
2.11.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				27.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	27.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00
2.11.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	0	0,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00
2.11.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				12.550.000,00		14.550.000,00		14.550.000,00		14.550.000,00		14.550.000,00
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	12.550.000,00	1	14.550.000,00	1	14.550.000,00	1	14.550.000,00	1	14.550.000,00
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	0		1		1		1		1	
2.11.01.1.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	0	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00
2.11.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12.550.000,00		12.550.000,00		12.550.000,00		12.550.000,00		12.550.000,00
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	12.550.000,00	1	12.550.000,00	1	12.550.000,00	1	12.550.000,00	1	12.550.000,00
2.11.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00
2.11.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				151.768.000,00		42.000.000,00		47.000.000,00		127.000.000,00		57.000.000,00
Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	1	151.768.000,00	1	42.000.000,00	1	47.000.000,00	1	127.000.000,00	1	57.000.000,00
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0		1		1		1		1	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0		3		4		5		6	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0		40		1		1		1	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1		0		0		1		0	
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0		1		1		1		1	
2.11.01.1.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0	0,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00
2.11.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				74.880.000,00		0,00		0,00		75.000.000,00		0,00
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	74.880.000,00	0	0,00	0	0,00	1	75.000.000,00	0	0,00
2.11.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				56.888.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	56.888.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00
2.11.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00
2.11.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00
2.11.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0,00	40	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00
2.11.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0,00	3	15.000.000,00	4	20.000.000,00	5	25.000.000,00	6	30.000.000,00
2.11.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				637.559.000,00		678.049.000,00		710.023.000,00		745.705.000,00		785.627.000,00
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	637.559.000,00	2	678.049.000,00	2	710.023.000,00	2	745.705.000,00	2	785.627.000,00
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	0		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.11.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.404.000,00		9.404.000,00		9.404.000,00		9.404.000,00		9.404.000,00
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	9.404.000,00	1	9.404.000,00	1	9.404.000,00	1	9.404.000,00	1	9.404.000,00
2.11.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				169.553.000,00		169.553.000,00		169.553.000,00		169.553.000,00		169.553.000,00
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	169.553.000,00	2	169.553.000,00	2	169.553.000,00	2	169.553.000,00	2	169.553.000,00
2.11.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Penggandaan				30.382.000,00		30.382.000,00		30.382.000,00		30.382.000,00		30.382.000,00
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	30.382.000,00	1	30.382.000,00	1	30.382.000,00	1	30.382.000,00	1	30.382.000,00
2.11.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				8.400.000,00		8.400.000,00		8.400.000,00		8.400.000,00		8.400.000,00
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	8.400.000,00	1	8.400.000,00	1	8.400.000,00	1	8.400.000,00	1	8.400.000,00
2.11.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	0	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00
2.11.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00
2.11.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				419.820.000,00		456.310.000,00		488.284.000,00		523.966.000,00		563.888.000,00
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	419.820.000,00	1	456.310.000,00	1	488.284.000,00	1	523.966.000,00	1	563.888.000,00
2.11.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00
2.11.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00
2.11.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				414.551.617,00		210.000.000,00		915.000.000,00		965.000.000,00		1.215.000.000,00
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	414.551.617,00	0	210.000.000,00	1	915.000.000,00	1	965.000.000,00	1	1.215.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		0		1		1		1	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	6		6		6		6		6	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		1		1	
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		0		0		0		1	
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		1		1		1	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
2.11.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		650.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	1	650.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00
2.11.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		500.000.000,00		250.000.000,00
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	500.000.000,00	1	250.000.000,00
2.11.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00
2.11.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00
2.11.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0,00		0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00
2.11.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				164.551.617,00		0,00		0,00		0,00		500.000.000,00
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	164.551.617,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	500.000.000,00
2.11.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	50.000.000,00	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
2.11.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00
2.11.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				250.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	0	250.000.000,00	1	310.000.000,00	1	310.000.000,00	1	310.000.000,00	1	310.000.000,00
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0		1		1		1		1	
2.11.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00
2.11.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
2.11.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00
2.11.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				660.000.000,00		631.500.000,00		632.000.000,00		632.000.000,00		632.000.000,00
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	660.000.000,00	1	631.500.000,00	1	632.000.000,00	2	632.000.000,00	2	632.000.000,00
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		1		1		1		1	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		2		2	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	48	48		50		50		50		50	
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0		10		10		10		10	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	22	22		22		22		22		22	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2		2		2		2		2	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0		0		1		1		1	
2.11.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	22	22	400.000.000,00	22	400.000.000,00	22	400.000.000,00	22	400.000.000,00	22	400.000.000,00
2.11.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00
2.11.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0,00	10	2.500.000,00	10	2.500.000,00	10	2.500.000,00	10	2.500.000,00
2.11.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000,00		54.000.000,00		54.000.000,00		54.000.000,00		54.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	48	48	50.000.000,00	50	54.000.000,00	50	54.000.000,00	50	54.000.000,00	50	54.000.000,00
2.11.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0,00		0,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00
2.11.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00
2.11.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	50.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00
2.11.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	66	70	12.963.054.291,88	72	14.013.737.064,65	74	15.054.916.237,86	76	16.120.565.222,55	78	17.010.523.593,59
2.11.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0		1		1		1		1	
2.11.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00
2.11.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00
2.11.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				113.156.803,00		134.000.000,00		143.000.000,00		153.000.000,00		163.000.000,00
Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	113.156.803,00	1	134.000.000,00	1	143.000.000,00	1	153.000.000,00	1	163.000.000,00
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	0		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0		1		1		1		1	
2.11.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00
2.11.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				113.156.803,00		123.000.000,00		132.000.000,00		142.000.000,00		152.000.000,00
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	113.156.803,00	1	123.000.000,00	1	132.000.000,00	1	142.000.000,00	1	152.000.000,00
2.11.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	0,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00
2.11.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00
2.11.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				16.360.000,00		110.000.000,00		150.000.000,00		600.000.000,00		1.005.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	16.360.000,00	0	110.000.000,00	0	150.000.000,00	0	600.000.000,00	1	1.005.000.000,00
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		2		3	
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		1	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		1	
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		1		0	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		5		7		9		10	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		1		0	
2.11.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		0,00		230.000.000,00		0,00
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	230.000.000,00	0	0,00
2.11.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		750.000.000,00
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	750.000.000,00
2.11.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	1	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	2	10.000.000,00	3	10.000.000,00
2.11.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				16.360.000,00		100.000.000,00		140.000.000,00		160.000.000,00		200.000.000,00
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	16.360.000,00	5	100.000.000,00	7	140.000.000,00	9	160.000.000,00	10	200.000.000,00
2.11.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		25.000.000,00
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	25.000.000,00
2.11.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		200.000.000,00		0,00
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0,00
2.11.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		20.000.000,00
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	20.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.11.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah				92.880.000,00		94.880.000,00		94.880.000,00		94.880.000,00		94.880.000,00
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	92.880.000,00	1	94.880.000,00	1	94.880.000,00	1	94.880.000,00	1	94.880.000,00
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0		1		1		1		1	
2.11.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				92.880.000,00		92.880.000,00		92.880.000,00		92.880.000,00		92.880.000,00
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	92.880.000,00	1	92.880.000,00	1	92.880.000,00	1	92.880.000,00	1	92.880.000,00
2.11.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00
2.11.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00
2.11.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah				71.139.980,00		112.169.980,00		122.169.980,00		132.169.980,00		172.169.980,00
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	0	71.139.980,00	0	112.169.980,00	0	122.169.980,00	0	132.169.980,00	1	172.169.980,00
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	2		2		2		2		2	
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0		1		1		1		1	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		1		1		1		1	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		1		1		1		1	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		1		1		1		1	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10		20		30		40		50	
2.11.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				60.169.980,00		60.169.980,00		60.169.980,00		60.169.980,00		60.169.980,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	2	60.169.980,00	2	60.169.980,00	2	60.169.980,00	2	60.169.980,00	2	60.169.980,00
2.11.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		30.000.000,00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	30.000.000,00
2.11.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00
2.11.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.970.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10	10.970.000,00	20	20.000.000,00	30	30.000.000,00	40	40.000.000,00	50	50.000.000,00
2.11.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00
2.11.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00
2.11.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				39.733.000,00		43.186.000,00		46.212.000,00		49.589.000,00		471.757.000,00
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	39.733.000,00	100	43.186.000,00	100	46.212.000,00	100	49.589.000,00	100	471.757.000,00
2.11.02.1.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi				39.733.000,00		43.186.000,00		46.212.000,00		49.589.000,00		0,00
Meningkatnya Dokumen RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi (Dokumen)		0	39.733.000,00	1	43.186.000,00	1	46.212.000,00	0	49.589.000,00	0	0,00
	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali (Dokumen)	0	1		0		0		0		0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst yang ditetapkan (Dokumen)		0		0		0		1		0	
2.11.02.1.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi				0,00		43.186.000,00		46.212.000,00		0,00		0,00
Tersedianya Dokumen Telaahan kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi (Dokumen)		0	0,00	1	43.186.000,00	1	46.212.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11.02.1.01.0003 - Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH				0,00		0,00		0,00		49.589.000,00		0,00
Tersedianya dokumen rencana tematik yang merupakan bagian arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst yang ditetapkan (Dokumen)		0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	49.589.000,00	0	0,00
2.11.02.1.01.0006 - Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi				39.733.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali (Dokumen)	0	1	39.733.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11.02.1.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi				0,00		0,00		0,00		0,00		471.757.000,00
Persentase Dokumen KLHS Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun (Dokumen)		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	471.757.000,00
	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota (Dokumen)		0		0		0		0		1	
	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun (Dokumen)		0		0		0		0		1	
	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun (Dokumen)		0		0		0		0		1	
2.11.02.1.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD				0,00		0,00		0,00		0,00		300.000.000,00
Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun (Dokumen)		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	300.000.000,00
2.11.02.1.02.0007 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang				0,00		0,00		0,00		0,00		50.000.000,00
Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun (Dokumen)		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	50.000.000,00
2.11.02.1.02.0008 - Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup				0,00		0,00		0,00		0,00		100.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersusunnya KLHS untuk KRP Lainnya yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun (Dokumen)		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100.000.000,00
2.11.02.1.02.0009 - Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		21.757.000,00
Tersedianya dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota (Dokumen)		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	21.757.000,00
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				1.010.412.100,00		1.098.235.064,00		1.175.189.430,00		1.261.066.189,00		1.357.150.849,00
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	61,63	81,16	1.010.412.100,00	81,36	1.098.235.064,00	81,56	1.175.189.430,00	81,76	1.261.066.189,00	81,96	1.357.150.849,00
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	80	80,61		80,91		81,21		81,51		81,81	
2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				608.246.500,00		651.987.259,00		690.315.038,00		728.086.349,00		775.942.769,00
Meningkatnya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	0	1	608.246.500,00	1	651.987.259,00	1	690.315.038,00	1	728.086.349,00	1	775.942.769,00
	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)		3		4		5		5		7	
	Dokumen Neraca SDA-LH yang disusun sesuai kewenangannya (Dokumen)		0		0		0		0		1	
	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	0	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Laporan)	0	1		1		1		1		1	
	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan (Unit)		0		0		0		0		1	
	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan (Unit)		0		0		0		1		1	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah laporan pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (Laporan)		1		1		1		1		1	
	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun (laporan)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan (Laporan)		1		1		1		1		1	
	Jumlah dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya (Dokumen)		0		0		0		0		1	
	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan (Kegiatan)	0	1		1		1		1		1	
2.11.03.1.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00
2.11.03.1.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				97.329.500,00		105.789.259,00		113.202.038,00		121.474.349,00		130.729.769,00
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1	97.329.500,00	1	105.789.259,00	1	113.202.038,00	1	121.474.349,00	1	130.729.769,00
2.11.03.1.01.0006 - Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
Terlaksananya kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Laporan)	0	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00
2.11.03.1.01.0008 - Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut				43.870.000,00		47.683.000,00		51.024.000,00		54.752.000,00		58.924.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun (laporan)	1	1	43.870.000,00	1	47.683.000,00	1	51.024.000,00	1	54.752.000,00	1	58.924.000,00
2.11.03.1.01.0009 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				229.360.000,00		247.557.000,00		263.502.000,00		261.296.000,00		281.205.000,00
Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)		3	229.360.000,00	4	247.557.000,00	5	263.502.000,00	5	261.296.000,00	7	281.205.000,00
2.11.03.1.01.0010 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan (Kegiatan)	0	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00
2.11.03.1.01.0011 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
Tersedianya dokumen hasil inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	0	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00
2.11.03.1.01.0012 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah				152.687.000,00		165.958.000,00		177.587.000,00		190.564.000,00		205.084.000,00
Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	1	1	152.687.000,00	1	165.958.000,00	1	177.587.000,00	1	190.564.000,00	1	205.084.000,00
2.11.03.1.01.0013 - Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi				0,00		0,00		0,00		20.000.000,00		5.000.000,00
Tersedianya peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan (Unit)		0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	20.000.000,00	1	5.000.000,00
2.11.03.1.01.0014 - Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi				0,00		0,00		0,00		0,00		5.000.000,00
Beroperasi dan berfungsinya alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan (Unit)		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	5.000.000,00
2.11.03.1.01.0016 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan (Laporan)		1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00
2.11.03.1.01.0017 - Penyusunan Neraca SDA-LH Provinsi				0,00		0,00		0,00		0,00		5.000.000,00
Tersusunnya Neraca SDA-LH sesuai kewenangan Provinsi	Dokumen Neraca SDA-LH yang disusun sesuai kewenangannya (Dokumen)		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	5.000.000,00
2.11.03.1.01.0018 - Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya				0,00		0,00		0,00		0,00		5.000.000,00
Tersusunnya dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Jumlah dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya (Dokumen)		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	5.000.000,00
2.11.03.1.01.0020 - Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
Laporan pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup	Jumlah laporan pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (Laporan)		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00
2.11.03.1.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00
Meningkatnya Penanggulangan Pencemaran dan/atu Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan (Laporan)	0	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00
	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	0	1		1		1		1		1	
	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)	0	0		0		0		1		1	
2.11.03.1.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
Terlaksananya Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	0	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00
2.11.03.1.02.0003 - Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				0,00		0,00		0,00		5.000.000,00		5.000.000,00
Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.11.03.1.02.0004 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan (Laporan)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00
2.11.03.1.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00
Meningkatnya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	luas area yang dilakukan restorasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi (Ha)	0	0,1	65.000.000,00	0,1	65.000.000,00	0,1	65.000.000,00	0,1	65.000.000,00	0,1	65.000.000,00
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1	
	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	0	1		1		1		1		1	
	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan (Laporan)	0	1		1		1		1		1	
	luas area yang dilakukan rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi (Ha)	0	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1	
2.11.03.1.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00
2.11.03.1.03.0006 - Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.11.03.1.03.0007 - Pelaksanaan rehabilitasi				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
kegiatan rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi (Ha)	0	0,1	20.000.000,00	0,1	20.000.000,00	0,1	20.000.000,00	0,1	20.000.000,00	0,1	20.000.000,00
2.11.03.1.03.0008 - Pelaksanaan Restorasi				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00
kegiatan restorasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan restorasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi (Ha)	0	0,1	15.000.000,00	0,1	15.000.000,00	0,1	15.000.000,00	0,1	15.000.000,00	0,1	15.000.000,00
2.11.03.1.03.0009 - Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00
kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	0	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00
2.11.03.1.03.0014 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan (Laporan)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	61,63	62,03	1.010.412.100,00	62,23	1.098.235.064,00	62,43	1.175.189.430,00	62,63	1.261.066.189,00	62,83	1.357.150.849,00
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	80	80,61		80,91		81,21		81,51		81,81	
2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup				307.165.600,00		351.247.805,00		389.874.392,00		432.979.840,00		481.208.080,00
Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	0	1	307.165.600,00	1	351.247.805,00	1	389.874.392,00	1	432.979.840,00	1	481.208.080,00
	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	797	817		827		837		847		857	
2.11.03.1.01.0004 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00
Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	0	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00
2.11.03.1.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi				305.165.600,00		349.247.805,00		387.874.392,00		430.979.840,00		479.208.080,00
Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	797	817	305.165.600,00	827	349.247.805,00	837	387.874.392,00	847	430.979.840,00	857	479.208.080,00
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				109.917.500,00		115.124.000,00		119.688.000,00		224.781.000,00		230.478.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	8	12	109.917.500,00	14	115.124.000,00	16	119.688.000,00	18	224.781.000,00	20	230.478.000,00
2.11.04.1.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi				109.917.500,00		115.124.000,00		119.688.000,00		224.781.000,00		230.478.000,00
Meningkatnya Kualitas Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola(Unit)	0	1	109.917.500,00	1	115.124.000,00	1	119.688.000,00	1	224.781.000,00	1	230.478.000,00
	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Ha)	0	1		1		1		1		1	
	Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Unit)		1		1		1		1		1	
	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Unit)	0	0		0		0		0		1	
	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	0	0		1		0		0		0	
	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	1	2		1		3		3		3	
2.11.04.1.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				0,00		10.000.000,00		0,00		0,00		0,00
Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun(Dokumen)	0	0	0,00	1	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11.04.1.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Ha)	0	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00
2.11.04.1.01.0006 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				26.201.500,00		18.478.000,00		30.474.000,00		32.701.000,00		35.192.000,00
Meningkatnya jumlah orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	1	2	26.201.500,00	1	18.478.000,00	3	30.474.000,00	3	32.701.000,00	3	35.192.000,00
2.11.04.1.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola(Unit)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00
2.11.04.1.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan				53.716.000,00		56.646.000,00		59.214.000,00		162.080.000,00		155.286.000,00
Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Unit)		1	53.716.000,00	1	56.646.000,00	1	59.214.000,00	1	162.080.000,00	1	155.286.000,00
2.11.04.1.01.0009 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		10.000.000,00
Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	10.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				230.521.300,00		250.557.000,00		268.114.000,00		287.707.000,00		309.628.000,00
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	45	55	230.521.300,00	60	250.557.000,00	65	268.114.000,00	70	287.707.000,00	75	309.628.000,00
2.11.05.1.01 - Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				230.521.300,00		250.557.000,00		268.114.000,00		287.707.000,00		309.628.000,00
Meningkatnya Pengumpulan Limbah B3 yang sesuai dengan aturan	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi yang dilakukan (Usaha)	3	7	230.521.300,00	9	250.557.000,00	11	268.114.000,00	13	287.707.000,00	15	309.628.000,00
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
2.11.05.1.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00
2.11.05.1.01.0003 - Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terfasilitasinya pemenuhan persetujuan teknis pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00
2.11.05.1.01.0004 - Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala provinsi				210.521.300,00		230.557.000,00		248.114.000,00		267.707.000,00		289.628.000,00
Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi yang dilakukan (Usaha)	3	7	210.521.300,00	9	230.557.000,00	11	248.114.000,00	13	267.707.000,00	15	289.628.000,00
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				472.670.600,00		513.754.000,00		549.753.000,00		589.927.000,00		634.875.000,00
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi (%)	79,31	83,10	472.670.600,00	85,92	513.754.000,00	88,73	549.753.000,00	91,55	589.927.000,00	94,37	634.875.000,00
2.11.06.1.01 - Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				472.670.600,00		513.754.000,00		549.753.000,00		589.927.000,00		634.875.000,00
Meningkatnya Pengawasan Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD (Orang)	0	1	472.670.600,00	1	513.754.000,00	1	549.753.000,00	1	589.927.000,00	1	634.875.000,00
	Jumlah Sarana Prasarana yang disediakan untuk Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan dan PPNS untuk menunjang Kinerja Penegakan Hukum (Unit)	0	1		1		1		1		1	
	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Usaha/Kegiatan)	50	55		60		65		70		75	
	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan (Dokumen)	15	20		25		30		35		40	
	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	0	1		1		1		1		1	
2.11.06.1.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				94.958.600,00		103.212.000,00		110.444.000,00		118.515.000,00		127.545.000,00
Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan (Dokumen)	15	20	94.958.600,00	25	103.212.000,00	30	110.444.000,00	35	118.515.000,00	40	127.545.000,00
2.11.06.1.01.0005 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.11.06.1.01.0007 - Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang dibentuk	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD (Orang)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00
2.11.06.1.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				347.712.000,00		380.542.000,00		409.309.000,00		441.412.000,00		477.330.000,00
Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Usaha/Kegiatan)	50	55	347.712.000,00	60	380.542.000,00	65	409.309.000,00	70	441.412.000,00	75	477.330.000,00
2.11.06.1.01.0010 - Layanan Sarana Prasarana Penegakan Hukum bidang Lingkungan Hidup				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
Penyediaan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Sarana Prasarana yang disediakan untuk Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan dan PPNS untuk menunjang Kinerja Penegakan Hukum (Unit)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				117.757.200,00		127.992.000,00		136.961.000,00		146.969.000,00		158.167.000,00
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	0	25	117.757.200,00	30	127.992.000,00	35	136.961.000,00	40	146.969.000,00	45	158.167.000,00
2.11.07.1.01 - Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
Meningkatnya Kegiatan Pengakuan MHA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH (Dokumen)	0	1	10.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00
2.11.07.1.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH				10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH (Dokumen)	0	1	10.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00
2.11.07.1.02 - Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				107.757.200,00		107.992.000,00		116.961.000,00		126.969.000,00		138.167.000,00
Meningkatnya MHA dan Kearifan Lokal Yang ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	1	1	107.757.200,00	1	107.992.000,00	1	116.961.000,00	1	126.969.000,00	1	138.167.000,00
2.11.07.1.02.0001 - Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH				107.757.200,00		107.992.000,00		116.961.000,00		126.969.000,00		138.167.000,00
Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	1	1	107.757.200,00	1	107.992.000,00	1	116.961.000,00	1	126.969.000,00	1	138.167.000,00
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				245.323.350,00		266.645.000,00		285.329.000,00		306.179.000,00		329.508.000,00
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	20	25	245.323.350,00	30	266.645.000,00	35	285.329.000,00	40	306.179.000,00	45	329.508.000,00
2.11.08.1.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi				245.323.350,00		266.645.000,00		285.329.000,00		306.179.000,00		329.508.000,00
Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Kelompok/Lembaga Masyarakat	Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan (Dokumen)	5	8	245.323.350,00	10	266.645.000,00	12	285.329.000,00	15	306.179.000,00	20	329.508.000,00
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat (Keluarga)	35	50		60		70		80		90	
	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	20	25		30		35		40		45	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat (Orang)	15	20		30		40		50		60	
2.11.08.1.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi				37.381.700,00		40.630.000,00		43.477.000,00		46.655.000,00		50.209.000,00
Meningkatnya jumlah penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup tingkat daerah provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat (Orang)	15	20	37.381.700,00	30	40.630.000,00	40	43.477.000,00	50	46.655.000,00	60	50.209.000,00
2.11.08.1.01.0004 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				55.588.800,00		60.420.000,00		64.654.000,00		69.378.000,00		74.665.000,00
Terlaksananya penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kawasan pemukiman yang sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat (Keluarga)	35	50	55.588.800,00	60	60.420.000,00	70	64.654.000,00	80	69.378.000,00	90	74.665.000,00
2.11.08.1.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat				42.974.850,00		46.710.000,00		49.983.000,00		53.635.000,00		57.722.000,00
Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala provinsi yang terdaftar di Provinsi yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	20	25	42.974.850,00	30	46.710.000,00	35	49.983.000,00	40	53.635.000,00	45	57.722.000,00
2.11.08.1.01.0007 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				109.378.000,00		118.885.000,00		127.215.000,00		136.511.000,00		146.912.000,00
Terlaksananya pengembangan generasi lingkungan melalui pembinaan, pendampingan, pembentukan dan pemberdayaan kader lingkungan, penyuluhan, dan pemberian penghargaan	Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan (Dokumen)	5	8	109.378.000,00	10	118.885.000,00	12	127.215.000,00	15	136.511.000,00	20	146.912.000,00
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				143.319.800,00		155.776.000,00		166.692.000,00		178.873.000,00		192.502.000,00
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	40	50	143.319.800,00	55	155.776.000,00	60	166.692.000,00	65	178.873.000,00	70	192.502.000,00
2.11.09.1.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi				143.319.800,00		155.776.000,00		166.692.000,00		178.873.000,00		192.502.000,00
Meningkatnya Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	15	16	143.319.800,00	17	155.776.000,00	18	166.692.000,00	19	178.873.000,00	20	192.502.000,00
2.11.09.1.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				143.319.800,00		155.776.000,00		166.692.000,00		178.873.000,00		192.502.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	15	16	143.319.800,00	17	155.776.000,00	18	166.692.000,00	19	178.873.000,00	20	192.502.000,00
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00
2.11.10.1.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Jumlah Laporan Pengaduan Lingkungan yang dtangani	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan)		6	50.000.000,00	8	50.000.000,00	10	50.000.000,00	12	50.000.000,00	14	50.000.000,00
2.11.10.1.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Penanganan Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan)		6	50.000.000,00	8	50.000.000,00	10	50.000.000,00	12	50.000.000,00	14	50.000.000,00
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				207.851.750,00		225.915.000,00		241.747.000,00		259.412.000,00		279.178.000,00
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	38	39	207.851.750,00	40	225.915.000,00	41	241.747.000,00	42	259.412.000,00	43	279.178.000,00
2.11.11.1.01 - Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				207.851.750,00		225.915.000,00		241.747.000,00		259.412.000,00		279.178.000,00
Meningkatnya Sampah yang Terkelola di Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan (Dokumen)		1	57.851.750,00	1	43.449.000,00	1	101.747.000,00	1	69.412.000,00	1	82.684.000,00
	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik (Unit)	0	0		0		0		0		1	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia (Unit)	0	0		0		1		1		0	
	Jumlah tonase Sampah yang ditangani dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan (Ton)	0	0		0		0		0		1	
2.11.11.1.01.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional				0,00		0,00		0,00		0,00		10.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	10.000.000,00
2.11.11.1.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				57.851.750,00		43.449.000,00		46.922.000,00		49.608.000,00		52.684.000,00
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan (Dokumen)		1	57.851.750,00	1	43.449.000,00	1	46.922.000,00	1	49.608.000,00	1	52.684.000,00
2.11.11.1.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				0,00		0,00		54.825.000,00		19.804.000,00		0,00
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	1	54.825.000,00	1	19.804.000,00	0	0,00
2.11.11.1.01.0017 - Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				0,00		0,00		0,00		0,00		20.000.000,00
Terlaksananya Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Jumlah tonase Sampah yang ditangani dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan (Ton)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	20.000.000,00
Meningkatnya Rumah Tangga yang mendapatkan Layanan Pengumpulan Sampah	Jumlah tonase timbulan sampah regional yang ditangani lintas kabupaten/kota (Ton)	0	0	150.000.000,00	0	182.466.000,00	0	140.000.000,00	0	190.000.000,00	1	196.494.000,00
	Jumlah sampah regional yang dikelola (Ton)		0		0		0		1		1	
	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional (Dokumen)	0	0		0		1		1		1	
	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)		0		1		0		0		0	
	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi Penanganan Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus (Dokumen)	0	1		1		1		1		1	
	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1	
	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional (Unit)	0	0		0		0		1		0	
	Jumlah tonase Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani (Ton)	0	0		0		0				1	
2.11.11.1.01.0009 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi				0,00		52.466.000,00		0,00		0,00		0,00

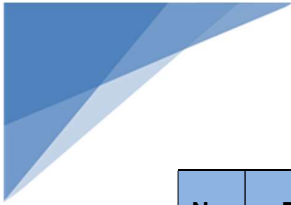
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)		0	0,00	1	52.466.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11.11.1.01.0010 - Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional				0,00		0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		26.494.000,00
Tersusunnya laporan pemantauan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	26.494.000,00
2.11.11.1.01.0011 - Pengelolaan sampah Regional				0,00		0,00		0,00		30.000.000,00		30.000.000,00
Terlaksananya pengelolaan sampah regional	Jumlah sampah regional yang dikelola (Ton)		0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00
2.11.11.1.01.0012 - Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional				0,00		0,00		0,00		50.000.000,00		0,00
Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	50.000.000,00	0	0,00
2.11.11.1.01.0014 - Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota				75.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota (Dokumen)	0	1	75.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
2.11.11.1.01.0015 - Pelaksanaan Penanganan Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi				0,00		0,00		0,00		0,00		20.000.000,00
Terlaksananya penanganan Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah tonase Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani (Ton)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00	1	20.000.000,00
2.11.11.1.01.0016 - Pelaksanaan penanganan sampah regional lintas kabupaten/kota				0,00		0,00		0,00		0,00		20.000.000,00
Terlaksananya penanganan sampah regional lintas kabupaten/kota	Jumlah tonase timbulan sampah regional yang ditangani lintas kabupaten/kota (Ton)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	20.000.000,00
2.11.11.1.01.0018 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus				75.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi Penanganan Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi Penanganan Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus (Dokumen)	0	1	75.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00

Program prioritas daerah adalah serangkaian kegiatan atau inisiatif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, bersifat strategis, berbasis kebutuhan potensi daerah serta terintegrasi. Program prioritas pembangunan daerah selama periode 2025-2029 sebanyak 10 program. Program ini dipilih berdasarkan kebutuhan paling mendesak masyarakat serta disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

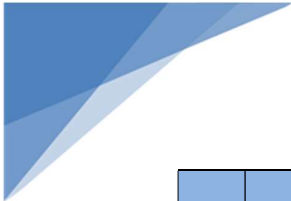
Pada tabel 4.4 merupakan rincian 10 program prioritas beserta dengan sub kegiatan yang mendukung program prioritas.

4.4 Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

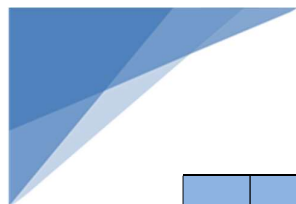
No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kewenangan Provinsi	1.1 Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	
			1.1.1 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
			1.1.2 Pengelolaan Kebun Raya	
			1.1.3 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
			1.1.4 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	



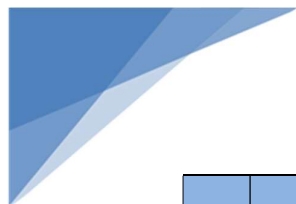
No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1.1.5 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	
			1.1.6 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	
2	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	2.1 Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	
			2.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	
			2.1.2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	
			2.1.3 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas rencana kebijakan dan teknis pengelolaan sampah regional	
			2.1.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST regional	



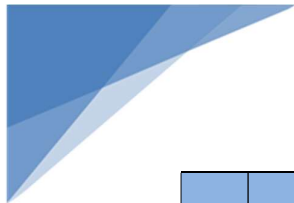
No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3.1 Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
			3.1.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			3.1.2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
			3.1.3 Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	
			3.1.4 Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Provinsi	
			3.1.5 Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	
			3.1.6 Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi	



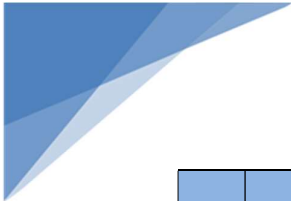
No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			3.1.7 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	
			3.1.8 Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			3.1.9 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			3.1.10 Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	
			3.1.11 Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	
			3.1.12 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemantau Kualitas Lingkungan di Provinsi	
			3.1.13 Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat Pemantau Kualitas Lingkungan di Provinsi	



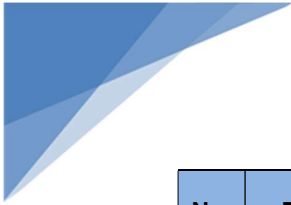
No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			3.1.14 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, Lahan	
			3.1.15 Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan Kewenangannya	
			3.1.16 Penyusunan dan Pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup antar Daerah	
			3.1.17 Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup	
			3.1.18 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	
			3.2 Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
			3.2.1 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	
			3.2.2 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	



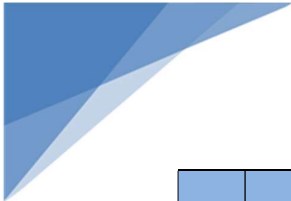
No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			3.2.3 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
			3.3 Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
			3.3.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	
			3.3.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Restorasi	
			3.3.3 Pelaksanaan Rehabilitasi	
			3.3.4 Pelaksanaan Restorasi	
			3.3.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	
			3.3.6 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar Lintas Kabupaten/Kota	
			3.3.7 Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi	



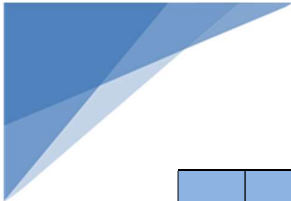
No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			3.3.8 Koordinasi dan Sinkronisasi Remediasi	
			3.3.9 Pelaksanaan Remediasi	
			3.3.10 Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, Lahan	
4	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	3.1 Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	
			3.1.1 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	
			3.1.2 Penyusunan RPPLH Provinsi	
			3.1.3 Penetapan RPPLH Provinsi	
			3.2 Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	



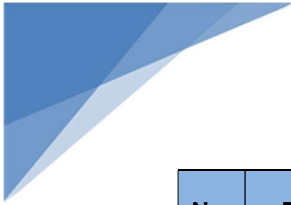
No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			3.2.1 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
			3.2.2 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	
			3.2.3 Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	
			3.2.4 Pembinaan, Penilaian, Evaluasi terhadap KLHS Kabupaten/Kota	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan Yang diterbitkan	5.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
			5.1.1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
			5.1.2 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	
			5.1.3 Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	



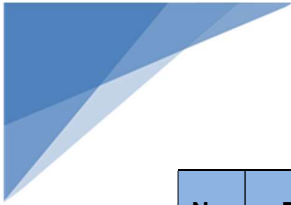
No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			5.1.4 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			5.1.5 Layanan Sarana Prasarana Penegakan Hukum bidang Lingkungan Hidup	
6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	6.1 Kegiatan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	
			6.1.1 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	
			6.2 Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	



No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			6.2.1 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	7.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	
			7.1.1 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
			7.1.2 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	
			7.1.3 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
			7.1.4 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat	



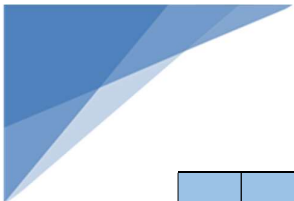
No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	8.1 Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	
			8.1.1 Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	9.1 Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	
			9.1.1 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	
			9.1.2 Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah	
			9.1.3 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	
			9.1.4 Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	



No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			9.1.5 Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi	
10	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	10.1 Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
			10.1.1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
			10.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup selama 5 tahun kedepan merupakan indikator yang terseleksi, ada 5 indikator beserta target tiap tahun yang masing masing target dari indikator dirinci pada tabel dibawah ini.

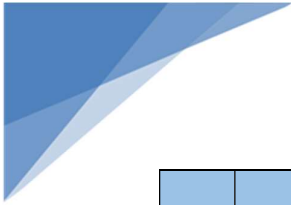


No	INDIKATOR	Satuan	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kualitas Air	Indeks	80,96	81,16	81,36	81,56	81,76	81,96
2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	80,31	80,61	80,91	81,21	81,51	81,81
3	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	79,92	79,97	80,02	80,07	80,12	80,17
4	Persentase Taman Kehati yang dikelola dan dibina	Persen	7,14	14,29	21,43	28,57	35,71	42,86
5	Emisi GRK Sektor Limbah	Gg CO2 Eq	362,91	352,91	342,91	332,91	322,91	312,91

4.6 Target Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja kunci (IKK) mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran suatu program, pada perangkat daerah lingkungan hidup terdapat 6 IKK beserta dengan target masing masing selama 5 tahun ke depan yang dirinci pada tabel dibawah ini.

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kualitas Air	Indeks	80,96	81,16	81,36	81,56	81,76	81,96
2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	80,31	80,61	80,91	81,21	81,51	81,81
3	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	79,92	79,97	80,02	80,07	80,12	80,17
4	Persentase Taman Kehati yang dikelola dan dibina	Persen	7,14	14,29	21,43	28,57	35,71	42,86



No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Emisi GRK Sektor Limbah	Gg CO2 Eq	362,9 1	352,91	342,91	332,91	322,9 1	312,91
6	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	38,2	39	40	41	42	43



BAB V

PENUTUP

Bab penutup memuat kesimpulan penting substansi, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 –2029 mencakup Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun anggaran selama kurun waktu lima tahun ke depan, sesuai dengan Misi yang diemban Dinas Lingkungan Hidup terkait. Tujuan dan Sasaran disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan dan sub kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan setiap tahun yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan, merupakan rangkaian yang sistematis untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Misi.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan Renstra dan jika keterbatasan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan antara lain :

- 1) Memprioritaskan pencapaian seluruh indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD;
- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup baik SDM maupun sarana prasarana guna sebesar-besarnya mendukung pencapaian indikator kinerja utama



(IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD;

- 3) Mengupayakan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga hasilnya akan lebih efektif dan optimal.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Lingkungan Hidup agar mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Seluruh aparatur pada Sekretariat dan bidang-bidang meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang sinergi, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan dokumen perencanaan tahunan selama lima tahun;
4. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, maka penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Lingkungan Hidup, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;

- 
6. Apabila terjadi perubahan kebijakan Pembangunan ditingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Pembangunan yang tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah yang disusun sesuai dengan Isu Strategis daerah dan perkembangan dinamika politik, sosial, budaya dan isu-isu permasalahan terkini, dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja OPD. Renstra ini juga merupakan Implementasi penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kerja, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi tengah Tahun 2025–2029 ini juga dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparatur baik jajaran struktural maupun fungsional dalam melaksanakan dan meningkatkan kualitas pelayanan, baik program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dinas/badan dan sasaran pembangunan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal dan berkualitas sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.